

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BEKASI

Oleh

✍ Ghaisal Ramadhan, Herbasuki Nurcahyanto, Tri Yuniningsih

Email: ghaisalr@gmail.com

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024)7465404

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id>, Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In the modern era, rapid economic growth and urbanization have resulted in a significant increase in waste production and environmental degradation. Effective and sustainable waste management is an important aspect of sustainable development. Bekasi City, with 2,496,198 people and waste generation of 637,778.59 tons in 2023, faces a waste problem that requires compliance with existing waste management policies. The aim of this research is to analyze the implementation of waste management policies in Bekasi City along with supporting and inhibiting factors. This research uses qualitative descriptive methods and Edward III's theory of public policy implementation. The research results show that policy implementation was not optimal at the time it was implemented. This is due to the phenomenon of waste reduction and handling which has not been optimal as a whole, even though some things are going well. The supporting factors in implementing this waste management policy are the disposition and structure of the bureaucracy which can run well, while the inhibiting factor in implementing the waste management policy lies in the phenomenon of communication and resources which still have symptoms of not being optimal in implementation. Given these obstacles, the researcher formulated suggestions to all parties involved in waste management policy in Bekasi City, namely carrying out more massive outreach to the community, improving the quality and quantity of supporting facilities in waste management, developing more modern waste processing, building a TPST, implementing public discussions, carrying out continuous communication with the community, and conducting education to improve the competency of human resources which are related to the implementation of waste management policies in Bekasi City.

Keywords: Implementation, Policy, Waste Management

PENDAHULUAN

Pada era modern seperti saat ini, yang mana pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang dilakukan oleh manusia telah berkembang pesat di seluruh dunia dan menghasilkan peningkatan yang sangat signifikan dalam produksi sampah dan degradasi lingkungan. Dengan terjadinya permasalahan tersebut, dalam pembangunan berkelanjutan ada salah satu aspek penting untuk memaksimalkan pembangunan berkelanjutan yaitu mengelola sampah secara efektif serta berkelanjutan.

Sampah menjadi suatu masalah yang tidak pernah lepas dari permasalahan di setiap negara maupun kota. Dengan banyaknya aktivitas manusia, produksi sampah meningkat, masih rendahnya kesadaran masyarakat dan dukungan untuk pengelolaan sampah, serta minimnya infrastruktur dan fasilitas sampah yang tidak memadai, menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Untuk menangani masalah sampah diperlukan pengelolaan sampah berupa pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan bahan sampah merupakan layanan publik penting yang membantu melindungi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah telah menjadi masalah yang harus

dihadapi oleh masyarakat yang hidup di perkotaan.

Pengelolaan sampah merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan, dan individu. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk menekan jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali bahan bila memungkinkan, dan membuang limbah secara aman yang tidak mungkin didaur ulang atau digunakan kembali. Pengelolaan sampah wajib dilaksanakan dengan menyeluruh serta terpadu melalui sumber sampah hingga pada pengolahan akhir sampah. Hal ini harus dilaksanakan mengingat sampah sekarang menjadi masalah nasional, jadi perlu ada langkah mengelola sampah secara efektif serta berkesinambungan mulai dari hulu sampai pada hilir, diharapkan dapat mengurangi efek negatif dari pembuangan sampah terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif dari pengelolaan sampah yang buruk dapat berakibat fatal pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi, yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan lingkungan yang memiliki keterkaitan terhadap sampah pasti ada di banyak tempat di Indonesia, dan Kota Bekasi adalah salah satunya. Pada penelitian ini memilih Kota Bekasi

sebagai lokus penelitian dikarenakan Kota Bekasi seringkali menghadapi permasalahan terkait timbulan sampah dan pengelolaan sampah yang belum optimal, selain itu juga Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga ibukota yang seharusnya memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik dan juga dengan pertumbuhan ekonomi serta urbanisasi yang pesat seharusnya Kota Bekasi mampu melakukan pengelolaan sampah secara optimal.

Di Kota Bekasi masalah sampah masih menjadi isu yang terus dihadapi oleh hampir semua wilayah di Kota Bekasi. Masalah yang terjadi dalam isu tersebut lebih terfokus pada teknik pengelolaan sampah dan manajemen pengolahan sampah. Masalah sampah yang terjadi di Kota Bekasi sudah menjadi masalah yang umum dan belum juga terselesaikan. Selain itu timbulan sampah yang dihasilkan sebagian besar karena kurangnya lahan guna dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) pada wilayah perkotaan. Saat ini Kota Bekasi sudah memiliki Tempat pembuangan sampah (TPA) Sumur Batu, lokasi TPA tersebut masih berfungsi sampai saat ini, akan tetapi TPA Sumur Batu Kota Bekasi saat ini sudah kelebihan kapasitas, hingga tidak semua sampah yang diproduksi harian dapat dibuat menuju TPA Sumur Batu. Selain itu dari total timbulan

sampah di Kota Bekasi sebanyak 1800-ton sampah per hari serta hanya 1000-1200-ton yang dapat terangkut masuk TPA (Wawancara dengan Sub Koordinator sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi), kemudian luas TPA Sumur Batu hanya 22 hektar yang memiliki 6 zona penampungan sampah dan hal tersebut masih dinilai kurang luas, karena besarnya timbulan sampah di Kota Bekasi yang termasuk sebagai kota penyangga ibukota belum dapat menampung semua sampah yang dibuat oleh masyarakat setiap hari. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui sampah yang tidak dapat diangkut karena TPA Sumur Batu tidak dapat menampung semua sampah Kota Bekasi memiliki potensi tinggi yang menyebabkan satu di antara sebab timbulnya TPS liar di Kota Bekasi.

Permasalahan sampah di Kota Bekasi bertambah menjadi permasalahan yang rumit dikarenakan meningkatnya jumlah masyarakat di Kota Bekasi setiap tahunnya, tentunya dengan masyarakat yang mengalami peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Mengacu pada data yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 mempertunjukkan bahwa kuantitas penduduk Kota Bekasi kerap mengalami

peningkatan pada tiap tahunnya. Dari peningkatan ini juga yang menyebabkan sampah yang dihasilkan Kota Bekasi terjadi peningkatan.

Faktor selanjutnya yang menambah persoalan mengenai sampah di Kota Bekasi yang akan dipaparkan pada penelitian ini yaitu merupakan jumlah timbulan sampah di Kota Bekasi masih tinggi dan masih jauh dari target penanganan dan pengurangan yang sudah ditentukan. Menurut data dari DLH Kota Bekasi, timbulan sampah yang terproduksi pada tahun 2021-2023 terjadi penurunan dalam timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Bekasi. Namun jumlah timbulan sampah tidak sepenuhnya dapat dikurangi. Misalnya, pada tahun 2022 timbulan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 4,04% atau 29,412.83 ton. Artinya jumlah sampah yang berhasil dikurangi belum memenuhi target pengurangan sampah yaitu 26% pada tahun 2022. Selain itu pada tahun 2023 jumlah sampah yang tertangani 57,24% atau 365,091.76 ton, hal ini masih belum sampai dengan target penanganan sampah yang ditentukan yaitu 72%.

Tingkat strategi pengelolaan sampah Kota Bekasi tahun 2021-2023 masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Capaian persentase pengelolaan sampah pada tahun 2021 sebesar 50,96%, tahun 2022

59,04%, tahun 2023 59,32%, dan pada tahun 2023 persentase pengelolaan sampah hanya mencapai 40,68%. Hal ini menunjukkan bahwa sampah yang dikelola oleh Kota Bekasi belum berjalan maksimal, karena dengan jumlah penduduk yang tinggi dan juga sebagai kota penyangga ibukota diperlukan pengelolaan yang lebih baik dan benar.

Selain itu juga permasalahan mengenai pengelolaan sampah bertambah jika sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah dinilai masih kurang cukup untuk mengangkut sampah di Kota Bekasi yang memiliki jumlah sampah yang tinggi, dari hasil wawancara dengan pegawai DLH Kota Bekasi yang menyampaikan bahwa kendaraan operasional truk yang mengangkut sampah dari masyarakat menuju ke TPS hanya mampu mengangkut sekitar 5 ton saja dan kendaraan operasional yang ada di Kota Bekasi dinilai belum cukup untuk mengangkut sampah dengan jumlah

Pemerintah Kota Bekasi tentunya tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan ini, banyak upaya yang akan dilakukan. Berdasarkan Tujuan dilakukannya proses mengelola sampah diatur pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 adalah guna melakukan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat serta mutu lingkungan hidup, memanfaatkannya

sebagai sumber daya, melakukan peningkatan efisiensi dalam menggunakan bahan baku, serta melakukan perubahan pada perilaku tiap individu.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Bekasi berusaha mendorong partisipasi publik dalam program pengurangan dan penanganan sampah. Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, beserta pemrosesan akhir adalah semua kegiatan penanganan sampah, sedangkan pengurangan sampah mencakup kegiatan 5R, yaitu merenungkan kembali (*rethink*), mengurangi (*reduce*), meremajakan (*reuse*), mengumpulkan (*recycle*), dan mengembalikan (*recover*). Pemerintah Kota Bekasi diharapkan berupaya melakukan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat diharapkan dapat menangani masalah sampah sebaik mungkin.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian ini karena akan membantu mengidentifikasi masalah dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang masih belum optimal. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan dijawab ialah bagaimana pemerintah Kota Bekasi melakukan implementasi kebijakannya untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah? dan apa

saja faktor pendukung serta faktor penghambat pada pelaksanaan kebijakan untuk mengelola sampah di Kota Bekasi?

KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Mengacu pada pernyataan Harold D. Lasswell serta Abraham Kaplan pada (Suwitri,2022) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu rancangan untuk mencapai tujuan, moral, dan aksi-aksi yang terencana. Adapun menurut J.E. Anderson (dalam Abdul Kadir, 2020: 3), Kebijakan adalah suatu panduan tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu atau lebih pihak untuk menyelesaikan masalah. Adanya pemusatan konsen akan tindakan sesungguhnya dan tidak berfokus di usulan maupun niat menjadi alasan pendekatan kebijakan dinilai sesuai.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh para pakar mengenai definisi kebijakan publik di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan terkait fokus kebijakan publik dalam studi ini ialah pada pelaksanaan kebijakan, di mana implementasi kebijakan akan ditulis pada penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Pengaturan pengelolaan sampah di Kota Bekasi seturut pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 yang menguraikan langkah-langkah dalam mengelola sampah, termasuk strategi untuk mengurangi serta menangani sampah di wilayah tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut definisi yang diberikan (Hill & Hupe, 2019) terkait akan implementasi kebijakan publik yang mengatakan implementasi kebijakan publik ialah fase kritis dalam proses kebijakan di mana keputusan pemerintah diubah menjadi tindakan nyata. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas termasuk pengorganisasian sumber daya, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Implementasi yang efektif adalah kunci untuk mencapai sasaran kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam model Edward menyatakan bahwa ada empat isu pokok yang harus menjadi perhatian dalam melakukan implementasi kebijakan agar mampu berjalan secara baik:

a. Komunikasi

Penentuan keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi. Implementasi dapat tercapai secara dengan baik apabila adanya tanggapan dan pemahaman dari pembuat keputusan.

b. Sumber daya

Salah satu hal esensial pada saat mengimplementasikan sebuah kebijakan baik dipengaruhi ketersediaan sumber daya. Kuantitas karyawan, kemahiran pelaksana, informasi relevan serta cukup guna melakukan implementasi kebijakan serta pemenuhan berbagai sumber yang

dibutuhkan pada pelaksanaan kebijakan, terdapat wewenang, serta adanya fasilitas pendukung menjadi komponen sumber daya.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekedar mengetahui apa yang perlu dikerjakan, melainkan pula wajib mempunyai keterampilan guna melakukannya. Hal ini berkaitan dengan sikap pelaksana, meliputi kesadaran pelaksana, petunjuk pelaksana, dan intensitas respon tersebut.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi sebagai entitas implementasi kebijakan wajib melakukan dukungan terhadap kebijakan yang ditentukan secara politik melalui koordinasi yang tepat. Saat struktur birokrasi tak berfungsi secara baik, menjadikan tidak efisiennya sumber daya dan menyebabkan adanya hambatan pada implementasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Digunakannya metode penelitian kualitatif deskriptif guna menganalisis suatu persoalan. Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu deskripsi yang padat, menelaah ucapan atau kata-kata, informasi detail dari perspektif responden, dan melakukan pendalaman pada kondisi yang terjadi secara rinci. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data

menggunakan teknik *snowball* dan juga penelitian ini menggunakan data primer yang kemudian didukung oleh data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini dapat diketahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi diatur pada Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam melakukan kelola sampah di Kota Bekasi terdapat proses pengurangan sampah tercantum dalam pasal 9 yang digunakan dengan teknik pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Kemudian daripada itu ada juga proses penanganan sampah tercantum dalam pasal 17 yang dilakukan dengan langkah mengerjakan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, serta pemrosesan akhir. Masih belum berjalan secara baik pelaksanaan kebijakan penanganan sampah yang mana menyebabkan timbulnya berbagai persoalan terkait sampah.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menekan jumlah sampah yang ditimbulkan dengan pengurangan serta penanganan sampah yang baik di Kota Bekasi, terdapat dalam pasal 7 mengenai

kebijakan pengelolaan sampah, yang mana pada penelitian ini pengelolaan sampah lebih dikhususkan sampah rumah tangga yang meliputi kebijakan serta strategi degradasi sampah serta kebijakan serta strategi penanganan sampah. Berikut adalah pemaparan hasil dari lapangan yang didapat oleh peneliti, yaitu:

Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah termasuk ke dalam kebijakan pengelolaan sampah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Dalam melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan, peneliti melihat bagaimana kebijakan pengurangan sampah dilakukan melalui proses:

a. Pembatasan timbulan sampah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembatasan timbulan sampah yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang belum melakukan pembatasan timbulan sampah.

b. Pendaauran ulang sampah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendaauran ulang sampah sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan sudah dilakukannya program bank sampah pada setiap kelurahan yang membantu mendaur ulang sampah.

c. Pemanfaatan kembali sampah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemanfaatan kembali sampah sudah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan pada program bank sampah selain mendaur ulang juga sudah dapat memanfaatkan kembali sampah yang ditimbulkan.

Penanganan Sampah

Dalam implementasi kebijakan penanganan sampah diperlukan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakannya, dapat terdiri dari aktor individu dan kelompok. Dalam melaksanakan penelitian terkait penanganan sampah, peneliti melakukan observasi langsung terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Semua aktor yang terlibat pada penanganan sampah memiliki peran beserta fungsi masing-masing yang mampu ditinjau dari proses:

a. Pemilahan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pemilahan sampah sudah berjalan dengan baik dikarenakan program bank sampah yang melibatkan masyarakat sudah memilah sampah dari hulu.

b. Pengumpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengumpulan sampah sudah berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah Kota Bekasi

sudah menyediakan TPS yang dapat mengumpulkan sampah yang dihasilkan masyarakat untuk dilakukan proses pengangkutan.

c. Pengangkutan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengangkutan sampah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan armada transportasi pengangkutan sampah ada beberapa yang mengalami kerusakan.

d. Pengolahan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pengolahan sampah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak semua masyarakat memiliki kemauan untuk mengolah sampah yang dihasilkannya secara mandiri.

e. Pemrosesan akhir sampah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemrosesan akhir sampah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan infrastruktur pendukung untuk memproses sampah belum tersedia dengan lengkap pada TPA Sumur Batu.

Faktor-Faktor Terkait Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan George C. Edward III. Edward III memaparkan adanya 4 faktor terhadap implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya,

disposisi, serta struktur birokrasi. Dari setiap faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa proses komunikasi yang terjadi pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah dilaksanakan secara baik, setiap gejala komunikasi dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi, akan tetapi masih ditemukan hambatan pada komunikasi eksternal dan juga pada kejelasan komunikasi, hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat Kota Bekasi yang belum menjalankan arahan untuk melakukan buang sampah pada tempatnya dan pengelolaan sampah. Selain itu komunikasi juga dinilai memiliki pengaruh dalam keberjalanan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang terdapat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik, setiap gejala sumber daya pada teori implementasi kebijakan menurut Edward telah dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi, akan tetapi setiap

proses pelaksanaannya tidak semua berjalan dengan maksimal dikarenakan ada beberapa SDM pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang belum bisa mengikuti kebijakan yang telah dibuat dan juga SDM dari masyarakat Kota Bekasi tidak seluruhnya telah menjalankan arahan untuk melakukan buang sampah pada tempatnya dan kelola sampah. Selain daripadanya sumber daya turut dinilai mempunyai pengaruh pada keberjalanan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

c. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa disposisi yang ada pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, setiap gejala disposisi dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Bekasi, secara keseluruhan pada setiap gejala dalam disposisi sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat kendala pada saat pelaksanaannya akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi keberjalanan disposisi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Selain itu disposisi juga dinilai memiliki pengaruh dalam keberjalanan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi, hal ini seturut akan wawancara yang dilakukan

dengan informan 1 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

d. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa diketahui bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh yang sangat penting untuk menjalankan tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dalam kebijakan pengelolaan sampah, semua gejala yang ada tentu harus dilakukan agar dapat menjalankan kebijakan sesuai Standard Operational Procedures (SOP) dan penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dilakukan secara baik serta benar sehingga tercapai tujuan yang diharapkan bagi pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Disposisi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dikarenakan pelaksanaan instruksi dari atasan kepada bawahan dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi telah berlangsung secara baik, ini bisa ditinjau melalui sikap para pelaksana yang telah membantu upaya pemerintah Kota Bekasi

untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

2. Struktur birokrasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dikarenakan dengan adanya *Standard Operational Procedures* (SOP) yang ditetapkan membantu dalam memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaan kebijakan. Adapun Fragmentasi dalam gejala struktur birokrasi juga telah dilakukan pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembagian tugas atau tanggung jawab pada saat melakukan pengelolaan sampah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi ialah:

1. Komunikasi menjadi faktor penghambat yang terletak pada gejala komunikasi eksternal dan juga gejala kejelasan komunikasi yang belum berjalan dengan baik, akan tetapi dari gejala lain dalam fenomena komunikasi telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dengan adanya hambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah belum dapat berjalan secara optimal.
2. Sumber daya menjadi faktor penghambat yang terletak pada sumber

daya manusia yang terlibat pada kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi yang belum seluruhnya memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik dalam menjalani kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi dianggap masih belum berjalan secara optimal pada pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan:

1. Fenomena pengurangan sampah masih ditemukan hambatan pada gejala pembatasan timbulan sampah. Dengan terjadinya hambatan tersebut menyebabkan proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi menjadi belum berjalan dengan optimal.
2. Fenomena penanganan sampah masih ditemukan hambatan pada gejala pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Dengan terjadinya hambatan tersebut menyebabkan proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi menjadi belum berjalan dengan optimal.

Terdapat faktor terkait dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah terdapat pada fenomena disposisi dan struktur birokrasi yang sudah berjalan dengan optimal.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah terdapat pada fenomena komunikasi dan sumber daya yang belum dapat berjalan dengan optimal.

SARAN

Saran terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah:

1. Melakukan sosialisasi secara lebih masif terkait pembatasan timbulan sampah kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami pentingnya pembatasan timbulan sampah dan kebijakan pengelolaan sampah dapat menjadi lebih baik lagi.
2. Meningkatkan mutu dan kuantitas fasilitas pendukung pada pengangkutan sampah, agar proses pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik dengan fasilitas yang lebih menunjang.
3. Melakukan pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan cara yang lebih modern, hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dengan melibatkan pihak swasta dan juga keterlibatan masyarakat Kota Bekasi.
4. Melakukan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)

yang modern pada TPA Sumur Batu agar Kota Bekasi memiliki standarisasi yang sama dengan kota lain yang sudah dapat melakukan pemrosesan akhir sampah yang lebih baik.

Saran terkait faktor penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah:

1. Melakukan edukasi berupa diskusi publik kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kota Bekasi.
2. Melakukan komunikasi yang berkelanjutan untuk menjaga kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah.
3. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bekasi serta melakukan edukasi terkait peningkatan kompetensi terhadap staf, petugas yang mengelola sampah, dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pihak yang terkait dalam kebijakan pengelolaan sampah dapat saling memahami peran dalam mengelola sampah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Erika, & Revida. (2020). "Transformasi Administrasi Publik: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Inovasi Di

Era Kontemporer." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, Hal. 45-62.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2020). *Pedoman Umum Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Pengelolaan Sampah Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management In The Context Of Waste Management) – Himpunan Mahasiswa Geografi Pembangunan. (2021, August 27). Retrieved November 18, 2022, From Ugm.Ac.Id Website:

<https://Hmgrp.Geo.Ugm.Ac.Id/2021/08/27/Pengelolaan-Sampah-Dalam->

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

SNI 19-2454-2002. (2002). *Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. In Badan Standar Nasional Indonesia.

Soetomo, Satrio. (2019). "Implementasi Konsep 5r Dalam Pengelolaan Sampah Di Era Modern." *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, Vol. 7, No. 2, Hal. 45-60.

Yusuf Bachtiar. (2020, March 2). *Mulai Awal Maret Ini, Kota Bekasi Resmi Melarang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai*. Retrieved March 24, 2024, from Tribunjakarta.com

BUKU

Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hill, M., & Hupe, P. (2019). *Implementing Public Policy: An Introduction to The Study Of Operational Governance*. Sage Publications.

Kadir, Abdul. (2020). "Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi." Penerbit Pustaka Cipta Mandiri.

Lofland, J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Terpadu*.

- Pasolong, George. (2019). "Administrasi Publik: Konsep, Prinsip, Dan Tantangan." Penerbit Citra Lestari.
- Perdana, A., & Pratama, B. (2019). Teori Dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Universitas Indonesia.
- Suwitri. (2022). "Analisis Kebijakan Publik: Perspektif Harold D. Lasswell Dan Abraham Kaplan." Penerbit Universitas Indonesia.
- Syahrudin. (2018). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusmedia.